

# STRATEGI KEHUMASAN DALAM PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

Tandawuya Christina Olivia

NPP. 31.0904

Asdraf Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara  
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Email: [tandawuyaolive@gmail.com](mailto:tandawuyaolive@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Megandaru Widhi Kawuryan, S.IP, M.Si

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on the deficiency of publicly accessible information for the populace in the transition from the 4.0 to the 5.0 era, which demands transparency in public information. **Purpose:** The objective of this research is to ascertain the appropriate public relations strategies for managing public information. **Method:** This study employs qualitative methods and analyzes communication strategies based on the concept of Anwar Arifin's Theory. Data collection techniques include observation, in-depth interviews (with 6 informants), and documentation. **Result:** The findings obtained by the author in this study indicate that the public relations strategies implemented are reasonably effective. However, there are several challenges in their execution, leading to incomplete realization of certain factors. **Conclusion:** The Public Relations strategies have been implemented to the best of their ability. However, during the execution, the Department of Communication, Informatics, and Cryptography encountered several challenges, leading to certain aspects not functioning at their maximum capacity.

**Keywords:** Strategy, Public Relations, Communication, Public Information

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada kurangnya informasi publik yang dapat dijangkau oleh Masyarakat dalam era 4.0 menuju 5.0 yang dituntut keterbukaan informasi publik. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi kehumasan yang tepat dalam mengelola informasi publik. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis terhadap strategi komunikasi menurut konsep Teori Anwar Arifin. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam (6 informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu strategi kehumasan yang dilakukan sudah cukup baik. Namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya yang menyebabkan dalam beberapa faktor masih belum terlaksana dengan maksimal. **Kesimpulan:** Strategi komunikasi sangat berperan penting dalam penerapan penyebaran dan pengelolaan informasi publik di era keterbukaan informasi publik. Strategi Kehumasan sudah diupayakan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan pelayanan informasi publik. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sehingga menyebabkan beberapa aspek belum berjalan dengan maksimal.

**Kata kunci:** Strategi, Humas, Komunikasi, Informasi Publik

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dengan adanya Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menuntut semua bidang untuk mengalami perubahan, dalam hal ini perbaikan dalam berbagai aspek salah satunya ialah dalam bidang pemerintahan. Pelaksanaan kebijakan pemerintah diupayakan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kondisi ini menuntut agar keterbukaan informasi dan harus bisa mawadai aspirasi dari masyarakat agar tujuan untuk merealisasikan demokratis dapat tercapai. Fenomena-fenomena yang terjadi akibat globalisasi membawa pada pengakuan bahwa hak untuk mendapatkan informasi menjadi bagian dari hak asasi manusia (Arif, 2022). Menurut Marshall McLuhan media disebutkan lewat slogan “*The Extension of Man*” dimana media merupakan perpanjangan tangan dari manusia, semua yang diinginkan dan dibutuhkan manusia seluruhnya dapat dijangkau lewat media terlebih media hibrida yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun (Aprilia & Wijaya, 2014). Dalam proses membentuk suatu daerah agar tidak tertinggal di era global, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu potensi dari daerah tersebut, ekonomi, sosial budaya, luas wilayahnya, kependudukan, keamanan dan pertahanan. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh juga pada organisasi pemerintah maupun swasta dalam hal meningkatkan kualitas sumber daya untuk memanfaatkan internet (Afnan, 2019).

Pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan e-government. Pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-government*) mewajibkan sistem pemerintahan yang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sehingga pelayanan publik yang diberikan lebih mudah, cepat dan efisien. Dinas Komunikasi dan Informatika yang merupakan badan pemerintahan yang bergerak di daerah dalam memberikan dan mengelola informasi untuk masyarakat diharapkan dapat memberikan pelayanan secara transparan dan akuntabel. Di era keterbukaan informasi publik, ketika masyarakat semakin bersikap kritis dan haus akan informasi, Humas dituntut untuk berani memberikan informasi yang jelas, akurat, dengan penuh transparansi, penyampaian yang tepat sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Kegagalan Humas dapat berakibat fatal, yakni terganggunya stabilitas kehidupan Masyarakat, tidak diterimanya kebijakan pemerintah di Tengah Masyarakat merupakan beberapa akibat dari kurang berperannya humas. Pelaksanaan strategi kehumasan berpengaruh penting dalam implementasi pelayanan publik di Kabupaten Minahasa Utara Sudah saatnya peran humas dioptimalkan agar fungsi kehumasan dapat berjalan dengan baik. Salah satunya humas sebagai komunikator atau juru bicara pemerintah. Humas harus mampu menjadi penyedia jalannya interaksi dan informasi kepada publik. Oleh karena itu Humas harus mampu dalam melaksanakan komunikasi yang baik. Komunikasi yang berlangsung secara dua arah baik itu dari instansi pemerintah kepada Masyarakat maupun Masyarakat kepada pemerintah (Basirun, 2014).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mengalami peningkatan dari kategori Kurang dengan indeks 1,51 tahun 2022 menjadi kategori Baik dengan Indeks 2,68 di tahun 2023. Hal ini merupakan hasil pemantauan dan evaluasi oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Reformasi Birokrasi (PANRB) dan berdasarkan SK menpan RB nomor 13 tahun 2024. Strategis kepada masyarakat. Dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 disebutkan bahwa unit yang bergerak di bidang teknologi, informasi, komunikasi, dan/atau kehumasan bertanggung jawab atas penyelenggaraan keterbukaan informasi (Prastowo, 2020). Kabupaten Minahasa Utara dengan

luas 1.059,24 Km. Hal ini menyebabkan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memerlukan strategi yang tepat untuk penyebaran informasi yang cepat dan menyeluruh kepada masyarakat. Melalui data di atas juga dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang dominan ialah usia yang produktif baik dalam bekerja dan menempuh pendidikan. Dari data di atas, masyarakat Kabupaten Minahasa Utara juga semestinya lebih bisa menerima dan mendapat informasi dari berbagai media terlebih media-media yang lebih canggih seperti media sosial mengingat pada usia tersebut rata-rata lebih cakap menggunakan teknologi. (Badan Pusat Statistik, 2023) Untuk mengimplementasikan pelayanan informasi yang cepat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya komunikasi kepada masyarakat, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Utara melakukan penyebaran informasi kepada publik lewat beberapa media komunikasi yang sering digunakan masyarakat saat ini. Beberapa diantaranya ialah Facebook, Instagram, dan Website resmi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Memanfaatkan platform media sosial dalam konteks kehumasan adalah langkah yang tepat dalam merealisasikan pemerataan penyebaran informasi.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penyebaran informasi publik yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Minahasa Utara. Dalam era 4.0 menuju 5.0, pemerintah dituntut untuk merealisasikan keterbukaan informasi public lewat perkembangan teknologi yang ada. Hal ini didukung dengan program pemerintah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hasil SPBE Kabupaten Minahasa Utara yang dahulu terbilang kurang kini di tahun 2023 mengalami peningkatan (*EMAGZ FIX LORES.Pdf*, n.d.) Namun dalam implementasinya masih ada beberapa kendala yang ditemui oleh Diskominfo Kabupaten Minahasa Utara. Dalam hal ini penyebaran yang dilakukan menggunakan media-media sosial seperti *facebook, Instagram, dan website*. Walaupun penduduk Kabupaten Minahasa Utara didominasi oleh penduduk yang berumur produktif, namun pada kenyataannya masih banyak Masyarakat yang belum mengetahui bagaimana mengakses informasi-informasi lewat media sosial. Begitu juga dengan permasalahan akun media sosial yang digunakan oleh Humas Diskominfo Kabupaten Minahasa Utara. Akun-akun yang menandakan bahwa digunakan resmi oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara belum terlihat jelas. Alhasil masih banyak Masyarakat yang merasa bingung dan kurang mengetahui harus kemana mereka mengakses informasi yang benar dan tepat.

Begitu juga dengan beberapa berita atau konten yang dibuat oleh Diskominfo Kabupaten Minahasa Utara yang masih menghadapi beberapa masalah atau perlu adanya perbaikan lebih lanjut agar konten atau berita yang akan dipublikasikan dapat terkesan lebih menarik. Beberapa diantaranya ialah dimana *website* resmi Kabupaten Minahasa Utara yang seringkali masih sulit untuk dibuka serta tampilan *website* yang belum cukup menarik dibandingkan dengan *website-website* resmi Kabupaten atau Kota lainnya. Begitu juga dengan pembuatan konten yang sudah cukup baik tapi memerlukan perbaikan dari segi sumber daya manusia maupun fasilitas/sarana-prasarana yang lebih memadai agar berita yang dipublikasikan lebih maksimal. Begitupun juga kurangnya sosialisasi terkait akun resmi pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sehingga masih banyak Masyarakat yang belum mengetahui.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks strategi humas atau kehumasan maupun konteks kegiatan pengelolaan atau penyebaran informasi publik. Penelitian Finnas, Fauzia Trisani berjudul Strategi Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali Dalam Pengelolaan Informasi Publik (Trisani, 2019), menemukan bahwa strategi humas Diskominfo Kabupaten Boyolali dalam pengelolaan informasi publik adalah dengan menggunakan Hasil penelitian strategi humas Diskominfo Kabupaten Boyolali dalam pengelolaan informasi publik adalah dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan operasional, pendekatan persuasif edukatif, dan pendekatan Kerjasama. Alur pengelolaannya juga sesuai dengan pedoman pelaksanaan langsung oleh Kominfo. Penelitian Aidah, Shafa Nur yang berjudul Strategi Komunikasi Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dalam Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Barat menemukan bahwa Humas dan protokol pemprov Jawa Barat menyampaikan informasi dengan menggunakan surat, media cetak, media massa, media online dan dilaksanakan berdasarkan strategi komunikasi secara bertahap dan terstruktur (Aidah, 2019). Penelitian Maya Agustia dan Nur Anisah yang berjudul menemukan bahwa Humas Polda Aceh melakukan Upaya dalam Hasil Penelitian yaitu Humas Polda Aceh melakukan Upaya dalam memperbaiki citra positif dengan pelayanan SIM keliling, layanan pengaduan masyarakat, melakukan pengamanan di hari besar, penyebaran informasi lewat media sosial, cetak, dan elektronik. (Agustia & Anisah, 2018). Penelitian Dhea Munggaran dan Yuliani Rachma selanjutnya berkaitan dengan Strategi Komunikasi Media Online Bengkulu Dalam Proses Penyajian Informasi Melalui Akun Instagram @Bengkuluexpress.com. menemukan bahwa tahapan strategi komunikasi ada empat tahap yaitu mengenal khalayak, menentukan pesan, menetapkan metode, dan terakhir seleksi dan penggunaan media. (Munggaran & Putri, 2021). Berdasarkan hasil penelitian Dkhorir Afnan tentang Fungsi Humas Desa Sebagai Pengelola Informasi di Era Keterbukaan Informasi Publik, penulis menemukan setiap perangkat desa difungsikan perannya sebagai humas desa atau pengelola informasi yang berkewajiban memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat. Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa ini diharapkan menghasilkan kondisi masyarakat yang berdaya guna (Afnan, 2019).

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni strategi kehumasan dalam pengelolaan informasi publik dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis konsep teori dari Anwar Arifin yang dimana pada salah satu dimensi mengangkat tentang pencapaian efek dari strategi tersebut dalam hal ini respon masyarakat yang berbeda dengan penelitian Finnas, Aidah, Agustia dan Anisah, Dhea dan Yuliani, maupun Afnan yang rata-rata dalam penelitian strategi menggunakan analisis SWOT dimana sebagian besar meneliti tentang untung rugi sehingga dapat mencapai strategi yang efektif tetapi dalam penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan pada respon balik atau *feedback* dari Masyarakat dikarenakan informasi publik adalah sebuah bentuk pelayanan yang membutuhkan komunikasi dua arah.

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa strategi kehumasan yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Minahasa Utara dalam pengelolaan informasi publik serta respon balik Masyarakat terhadap upaya yang telah dilakukan.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu serta perilaku yang diamati. Metode penelitian kualitatif alami atau biasa disebut dengan *natural surfing* sebagai sumber data langsung dan deskriptif. Metode kualitatif lebih menekankan pada proses daripada hasil. Metode Analisa induktif sering digunakan dalam penelitian kualitatif, dan pentingnya temuan tidak dapat dilebih-lebihkan. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data pasti. Data yang pasti adalah data yang benar-benar terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang hanya terlihat atau terucap, melainkan data yang memuat makna yang ada di balik apa yang dilihat dan dinyatakan (Abdussamad, 2021)

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan observasi yakni melakukan review dikenal dengan prosedur observasi. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memperoleh bukti yang mendukung subjek yang sedang diperiksa (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Diskominfo, Sekretaris Dinas, Pranata Humas, Anggota Bidang Informasi Publik dan Masyarakat. Adapun pengumpulan data dengan dokumentasi.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini penulis menganalisa strategi yang dilakukan Diskominfo dalam menjalankan fungsi kehumasannya, Humas memerlukan strategi komunikasi. Dalam penelitian ini menggunakan 4 tahap dalam menjalankan strategi yaitu mengenal komunikan, menentukan pesan, penggunaan media, dan pencapaian efek (Arifin, 1994) Adapun implikasi Strategi Komunikasi yang terbagi dalam subbab berikut:

### **3.1. Menenal Komunikan**

Komunikan atau penerima pesan adalah pihak yang akan menjadi tujuan untuk menerima isi pesan. Komunikan dalam hal ini adalah masyarakat Kabupaten Minahasa Utara. DKIP memilih media sosial, terutama Facebook, sebagai salah satu platform untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Ini menunjukkan responsifnya pemerintah terhadap tren penggunaan media sosial oleh masyarakat modern. Namun, penting untuk dipertimbangkan apakah semua lapisan masyarakat memiliki akses dan keterampilan yang sama dalam menggunakan media sosial.

### **3.2. Menentukan Pesan**

Sebuah informasi atau isi pesan yang akan disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian ialah berupa kejadian, kegiatan pemerintahan, atau bahkan prestasi yang dilakukan pemerintah atau yang terjadi di Kabupaten Minahasa Utara. Pesan yang disampaikan oleh DKIP

haruslah informatif, relevan, dan menarik bagi masyarakat. Namun, kendala dalam hal sumber daya manusia dan sarana prasarana menunjukkan bahwa ada tantangan dalam menghasilkan konten yang berkualitas secara konsisten. Diperlukan investasi lebih lanjut dalam pelatihan dan pengadaan perlengkapan kantor untuk memastikan produksi konten yang optimal.

**Tabel 1.**  
**Sumber Daya Manusia Dinas Kominfosan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| No           | Tingkat Pendidikan | Kepala Dinas dan Sekretaris |          | Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik |          | Bidang E-Government |          | Bidang Statistik |          | Bidang Persandian |          | Jumlah    |
|--------------|--------------------|-----------------------------|----------|--|----------|---------------------|----------|------------------|----------|-------------------|----------|-----------|
|              |                    | P                           | L        | P  | L        | P                   | L        | P                | L        | P                 | L        |           |
| 1            | SMP Sederajat      | -                           | -        | -  | -        | -                   | -        | -                | -        | -                 | -        | 0         |
| 2            | SMA Sederajat      | 1                           | 2        | -  | -        | -                   | -        | -                | -        | -                 | -        | 3         |
| 3            | D3                 | -                           | -        | -  | -        | -                   | -        | -                | -        | -                 | -        | 0         |
| 4            | S1                 | 6                           | 2        | 2  | 2        | 1                   | 2        | -                | 3        | 2                 | 1        | 21        |
| 5            | S2                 | -                           | 3        | -  | -        | -                   | 1        | -                | -        | -                 | -        | 4         |
| 6            | S3                 | -                           | -        | -  | -        | -                   | -        | -                | -        | -                 | -        | 0         |
| <b>TOTAL</b> |                    | <b>7</b>                    | <b>7</b> | <b>2</b>   | <b>2</b> | <b>1</b>            | <b>3</b> |                  | <b>3</b> | <b>2</b>          | <b>1</b> | <b>28</b> |

Sumber: Renstra Diskominfo Minut 2022

Pada **Tabel 1** terdata bahwa jumlah personil Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Minahasa Utara hanya berjumlah 28 orang. Dimana untuk anggota bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik hanya terdiri dari 4 orang saja. Dalam pengelolaan konten atau berita yang pada 1 hari saja terdapat beberapa kegiatan pemerintahan sehingga kurang optimal jumlah anggota untuk peliputan data dan penyuntingan konten. Karena itu diperlukan penambahan anggota pada bidang tersebut dimana sudah disesuaikan dengan *softskill* atau keterampilan dalam meliput dan menyunting berita. (Diskominfo Minut, 2022)

**Tabel 2.****Sarana dan Prasarana Dinas Kominfosan Kabupaten Minahasa Utara**

| No | Sarana dan Prasarana                             | Jumlah        | Kondisi |    |    |
|----|--|---------------|---------|----|----|
|    |  | unit/buah/set | B       | RR | RB |
| 1  | Lemari Besi Brother / 2 Pintu                    | 2             |         | 1  | 1  |
| 2  | Lemari Kayu Arsip 2 Pintu                        | 2             |         | 2  |    |
| 3  | Kursi Putar Brother / Hidrolik                   | 1             |         |    | 1  |
| 4  | Meja Kayu 1 Biro                                 | 1             | 1       |    |    |
| 5  | Meja Kayu 1/2 Biro General / Meja Kerja          | 34            | 12      | 10 | 12 |
| 6  | Sofa Lokal Kulit / Warna tan                     | 2             |         | 2  |    |
| 7  | computer PC                                      | 5             |         | 5  |    |
| 8  | Kursi kerja                                      | 34            | 12      | 10 | 12 |
| 9  | Printer canon 2700                               | 2             |         | 2  |    |
| 10 | Printer Epson L360                               | 3             | 2       | 1  |    |
| 11 | Mesin Absensi Solution X302-s                    | 1             |         | 1  |    |
| 12 | Kulkas/Lemari Es LG GN-Y201 CH                   | 1             | 1       |    |    |
| 13 | AC 1 PK  | 2             | 1       |    | 1  |
| 14 | AC ½ PK  | 2             | 1       |    | 1  |
| 15 | Televisi LG Led TV 32LH51                        | 1             | 1       |    |    |
| 16 | kendaraan dinas roda 4 jenis Nissan Grand Livina | 1             |         | 1  |    |
| 17 | Kamera   | 2             |         | 1  | 1  |
| 18 | Drone  | 1             |         |    | 1  |

*Ket. B = Baik, RR = Rusak Ringan, RB = Rusak Berat.*

*Sumber: Renstra Diskominfo Minut 2022*

Pada **Tabel 2.** memperlihatkan bahwa sebanyak 27 item rusak berat terdiri dari sarana perlengkapan penunjang kegiatan kantor. Saat ini perlengkapan seperti yang terdiri kendaraan Dinas untuk operasional masih kurang, selain itu item yang cukup penting diantaranya komputer/laptop yang sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah pegawai 28 orang menjadikan kegiatan operasional di Dinas tidak berjalan dengan Optimal. Selain item komputer/laptop, bangunan gedung kantor sudah tidak begitu baik untuk ditempati karena kondisi yang rusak parah dengan status pinjam pakai, sehingga diharapkan bisa menjadi prioritas perbaikan ataupun pengadaan gedung baru (Diskominfo Minut, 2022)

### 3.3. Penggunaan Media

Suatu proses komunikasi dapat berlangsung dengan menggunakan strategi yang efektif tidak hanya ditentukan berdasarkan isi pesan atau informasi yang akan disampaikan. Melainkan media atau alat untuk menyampaikan pesan tersebut pun sangat berpengaruh dalam melancarkan proses komunikasi yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat mengirim pesan kepada penerima agar dapat dimengerti dengan baik. (Arifin, 1994). Penggunaan media dalam mengunggah sebuah berita atau konten merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam penyebaran informasi. Diskominfo telah mencoba berbagai jenis media, termasuk media sosial, media cetak, dan media suara.

Namun, perlu dipertimbangkan apakah penggunaan media tersebut benar-benar mencerminkan preferensi dan kebiasaan konsumsi media masyarakat Minahasa Utara secara keseluruhan. Selain itu, strategi penggunaan fitur media yang tepat juga menjadi faktor penting untuk memastikan konten yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh komunikan.

### **3.4. Pencapaian Efek**

Evaluasi efektivitas penyebaran informasi berdasarkan feedback dari masyarakat adalah langkah yang baik. Namun, lebih dari sekadar jumlah followers atau interaksi di media sosial, penting untuk memahami dampak nyata dari informasi yang disebar, seperti tingkat kesadaran atau partisipasi masyarakat dalam program pemerintah. Selain itu, tantangan dalam kesadaran masyarakat terhadap akun resmi pemerintah menunjukkan perlunya upaya sosialisasi yang lebih luas dan terstruktur. Untuk meningkatkan efektivitas strategi komunikasi, perlu adanya upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan dari pemerintah daerah. Investasi dalam pengembangan SDM dan infrastruktur teknologi informasi menjadi prioritas utama. Selain itu, kolaborasi dengan pihak swasta dan lembaga pendidikan dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas produksi konten. Selanjutnya, evaluasi rutin terhadap strategi komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi dapat membantu menyesuaikan dan meningkatkan efektivitas program komunikasi.

Dengan demikian, pembahasan ini menggarisbawahi pentingnya strategi komunikasi yang efektif dalam membangun hubungan yang transparan dan berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang kebutuhan dan preferensi masyarakat, serta komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, diharapkan upaya penyebaran informasi publik dapat memberikan dampak yang positif dan signifikan bagi pembangunan Kabupaten Minahasa Utara.

### **3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dalam pelaksanaan setiap fungsi kehumasan berkaitan erat dengan komunikasi. Karena itu penelitian ini menggunakan beberapa aspek yang mempengaruhi jalannya fungsi kehumasan lewat komunikasi dua arah yang terjadi dalam pengelolaan informasi publik. Sama halnya dengan penelitian Dhea dan Yuliani, dimana dalam menganalisis strategi komunikasi menggunakan konsep teori dari Anwar Arifin yang terdiri dari 4 dimensi yaitu mengenal khalayak, menentukan pesan, menetapkan metode, dan penggunaan media. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi pun sangat berdampak atas pengelolaan dan penyebaran informasi publik terlebih lewat media sosial (Munggaran & Putri, 2021). Dalam penelitian strategi menggunakan analisis SWOT seperti pada penelitian Maya dan Nur dimana sebagian besar meneliti tentang untung rugi untuk dapat mencapai strategi yang efektif (Agustia & Anisah, 2018) Namun berbeda dengan penelitian ini, penulis memberikan sudut pandang yang berbeda yaitu dengan lebih menekankan pada respon balik atau *feedback* dari Masyarakat dikarenakan informasi publik adalah sebuah bentuk pelayanan yang membutuhkan komunikasi dua arah. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Shafa Nur Aidah dimana untuk mengimplementasikan strategi komunikasi dalam penyebaran informasi harus dilakukan secara bertahap dan terstruktur agar hasilnya pun akan sesuai dengan tujuan instansi (Aidah, 2019)

#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan dari penelitian ini ialah Strategi kehumasan sangat berperan penting dalam pengelolaan dan penyebaran informasi publik di Kabupaten Minahasa Utara. Semua bentuk strategi tersebut diimplementasikan lewat layanan kehumasan. Namun dalam beberapa penerapan layanan Diskominfo Kabupaten Minahasa Utara dalam penyebaran informasi publik belum berjalan dengan maksimal sehingga penulis menyarankan agar pemerintah daerah lebih memperhatikan kendala-kendala yang dialami Diskominfo Kabupaten Minahasa Utara berupa keterbatasan sumber daya dan fasilitas yang ada.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu instansi.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan strategi kehumasan dalam pengelolaan ataupun penyebaran informasi publik.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Diskominfo Kabupaten Minahasa Utara beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Syakir Media Press.
- Afnan, D. (2019). Fungsi Humas Desa Sebagai Pengelola Informasi di Era Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Soshum Insentif*, 153–163. <https://doi.org/10.36787/jsi.v2i2.135>
- Agustia, M., & Anisah, N. (2018). Strategi Komunikasi Humas Polda Aceh Untuk Membentuk Citra Positif Polisi di Mata Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik*, 2(2), 509–517. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/7516>
- Aidah, S. N. (2019). STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM MENERAPKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PROVINSI JAWA BARAT. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 51–66. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf> <http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal> <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001> <http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055> <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006> <https://doi.org/10.1>
- Aprilia, S. N., & Wijaya, A. F. (2014). *Efektivitas Website Sebagai Media E-Government dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah ( Studi Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang )*. 17(2), 126–135.
- Arif, M. (2022). Profil Internet Indonesia 2022. *SRA Consulting.*, June, 1–104.
- Arifin, A. (1994). *Strategi Komunikasi: Sebuah Pengantar Ringkas* (Ketiga). Armico.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Kabupaten Minahasa Utara Dalam Angka 2023. *Barito Utara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara*.

- Basirun, N. (2014). *KEHUMASAN PEMERINTAH DAERAH : Perubahan Paradigma dari Manajemen Komunikasi Searah ke Komunikasi Timbal Balik* (Kedua). Pustaka Giratuna.
- Diskominfo Minut. (2022). *Renstra Diskominfo Minut 2022. EMAGZ FIX LORES.pdf*. (n.d.).
- Munggaran, D. N., & Putri, Y. R. (2021). Strategi Komunikasi Pt. Media Online Bengkulu Dalam Proses Penyajian Informasi Melalui Akun Instagram@\_bengkuluekspressdotcom. *E-Proceeding of Management*, 8(5), 73–78.  
<https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/16671>
- Prastowo, F. A. A. (2020). Pelaksanaan fungsi pokok humas pemerintah pada lembaga pemerintah. *Profesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 5(1), 17.  
<https://doi.org/10.24198/prh.v5i1.23721>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Trisani, F. F. (2019). Strategi Humas Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Boyolali Dalam Pengelolaan Informasi Publik Department of Communication and Information Public Relations Strategy of Boyolali District in Public Information Management. *Lektur, Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 109–122.

